

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME  
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)

Adhika Ratdiananto  
Mochammad Al Musadieq  
Kadarisman Hidayat

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)  
[115030400111071@mail.ub.ac.id](mailto:115030400111071@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

*Local governments are required to manage and maximize the potential of existing economic resources for the survival and progress of their respective regions through regional revenue. One effort that can be done to maximize revenue from the sector area of local taxes. Probolinggo city which is a city of commerce and industry as well as its strategic location has great potential in local tax revenues in particular advertisement tax. This research include to kind of descriptive researchis using a quantitative approach. The purpose of this study is to determine the rate of growth and contribution of advertisement tax and local tax, as well as the barriers and efforts which done to increase advertisement tax and local tax revenue. Results of this research shows that the average growth rate of advertisement tax revenue for 2009-2014 reaches 2.57% and the growth rate of local tax revenue reaches 29,44%. The average contribution advertisement tax revenues toward local taxes income in 2009-2014 reaches 6,20% with low criteria.The efforts and strategies which is done by DPPKA Probolinggo City to increase tax revenue by optimizing advertisement tax through intensification and extensification.*

**Key Word:** *Advertisement tax, Local Tax, Rate of Growth, Contribution.*

ABSTRAK

*Pemerintah daerah diminta untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang ada untuk kelangsungan hidup dan kemajuan daerah masing-masing melalui pendapatan daerah.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari daerah sektor pajak daerah. Kota Probolinggo yang merupakan kotaperdagangan dan industri serta lokasinya yang strategis memiliki potensi besar dalam pendapatan pajak daerah pajak reklame. Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame dan pajak daerah, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk 2009-2014 mencapai 2,57% dan tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 29,44%. Pendapatan pajak reklame rata-rata kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah di 2009-2014 mencapai 6,20% dengan kriteria rendah. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh DPPKA Kota Probolinggo untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.*

**Kata Kunci:** *Pajak Reklame, Pajak Daerah, Laju Pertumbuhan, Kontribusi*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan tantangan pada tingkat global.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah dimana pemerintah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merubah paradigma

penyelenggaraan pemerintah di daerah dimana pemerintah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada sebelumnya menganut asas sentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistik dilakukan dengan diwujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berada di wilayahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Pemberian kewenangan pemerintah tersebut diharapkan membawa hal baru dalam perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya memberi dampak kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Keadaan tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat secara proporsional.

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti mengeliminir tingkat ketergantungannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah. Halim (2004) menyatakan semakin tinggi peran PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah.

Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang sedang berkembang, tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor.

bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kota Probolinggo itu sendiri.

Sebagai daerah yang telah mengalami perubahan karakteristik budaya masyarakatnya dari *agraris* menjadi *urbanis* (perkotaan), struktur perekonomian Kota Probolinggo didominasi oleh sektor-sektor jasa dan industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran,

Menurut data Struktur ekonomi Kota Probolinggo yang diambil dari website Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo pada tahun 2013 didominasi sektor Pertanian (6,36 %); Industri Pengolahan (12,67 %) serta Perdagangan, Hotel dan Restoran (45,39%). Kota Probolinggo dengan peran Perdagangan, Hotel dan Restoran yang besar, maka akan timbul persaingan diantara berbagai sektor dalam usaha tersebut dalam hal untuk merebut pangsa pasar yang ada pada masyarakat. Secara otomatis akan membuat daerah tersebut ramai akan penggunaan reklame sebagai penunjang dalam kegiatan usaha.

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah. Peneliti juga ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame serta pajak daerah, dan upaya-upaya saja yang dilakukan DPPKA untuk meningkatkan pajak reklame dan pajak daerah. Maka peneliti mengambil judul “ **Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah**”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Soemitro dikutip oleh Priantara (2013) diungkapkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Definisi pajak secara umum dapat

ditemui pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2013) sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan bahwa :

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, air permukaan, dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, parkir, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Pajak Reklame**

Pajak reklame di Kota Probolinggo diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan pajak reklame itu sendiri adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Nazir, 2005), yakni melakukan analisis dan menyajikan

fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman untuk dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yaitu data laporan realisasi pendapatan daerah kota Probolinggo periode 2009-2014 dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan dan kontribusi yang dianalisis menggunakan rumus (Arsyad, 2004) untuk laju pertumbuhannya, sedangkan untuk kontribusi digunakan rumus dari Daud dalam Halim (2004).

$$Gt = \frac{Yrt - Yr(t-1)}{Yr(t-1)} \times 100$$

Sumber: Arsyad, 2004

Keterangan:

Gt : Tingkat laju pertumbuhan pajak reklame

Yrt : Realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun tertentu

Yr (t-1): Realisasi penerimaan pajak reklame tahun sebelumnya

$$P = \frac{Xn}{Yn} \times 100$$

Sumber: Daud dalam Halim, 2004

Keterangan:

P : Kontribusi penerimaan pajak reklame

Xn : Jumlah realisasi penerimaan pajak reklame

Yn : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

n : Tahun (periode)

**Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Reklame**

No	Persentase	Kriteria
1	0-10%	Sangat Kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Cukup
4	30,10%-40%	Sedang
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Sripradita, 2014

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Laju Pertumbuhan**

1. Penerimaan Pajak Reklame

Perhitungan laju pertumbuhan reklame menggunakan rumus digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun. Laju Pertumbuhan

penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Probolinggo Tahun 2009-2014

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2009	794.506.529,00	-	-
2010	612.604.150,00	(181.902.379,00 )	-22,89%
2011	638.962.750,00	26.358.600,00	4,30%
2012	726.489.315,00	87.526.565,00	13,70%
2013	799.792.561,00	73.303.246,00	10,09%
2014	861.011.615,00	61.219.054,00	7,65%
Rata-rata			2,57%

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 2 diatasdapat diketahui rata-rata presentase laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kota Probolinggo tahun 2009-2014 sebesar 2,57%.

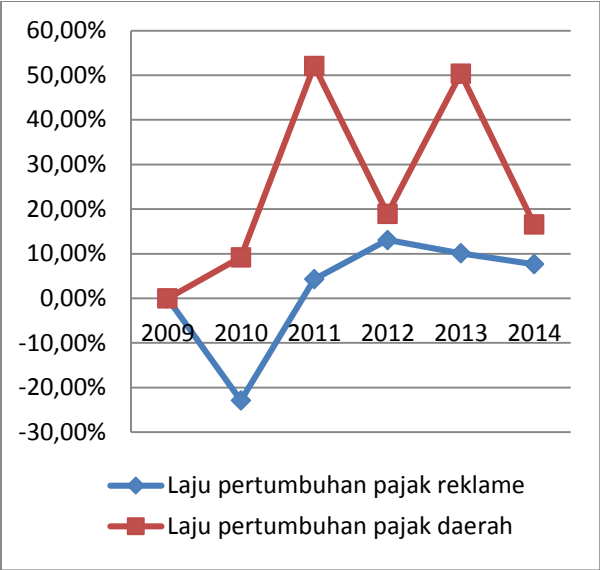
2. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009-2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Perubahan (Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2009	7.051.602.838,80	-	-
2010	7.701.059.684,00	649.456.845,20	9,21%
2011	11.713.781.859,00	4.012.722.175,00	52,10%
2012	13.933.502.844,00	2.219.720.985,00	18,95%
2013	20.950.774.756,00	7.017.271.912,00	50,36%
2014	24.428.934.181,00	3.478.159.425,00	16,60%
Rata-rata			29,44%

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui rata-rata realisasi pajak daerah sebesar 29,44%. Perbandingan pajak reklame dengan pajak daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009-2014

Sumber: Data diolah, 2015

Gambar 1 memperlihatkan bahwa peningkatan presentase pertumbuhan pajak daerah tidak selalu dibarengi dengan peningkatan persentase pertumbuhan pajak reklame.Laju pertumbuhan pajak reklame selalu lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan pendapatan pajak daerah.Pada periode 2009-2014 laju pertumbuhan pajak reklame lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan pajak daerah. Hal ini disebabkan penerimaan pajak reklame yang memiliki proporsi lebih kecil dibandingkan dengan komponen pajak daerah lain terlebih lagi penerimaan pajak reklame mengalami laju pertumbuhan minus pada tahun 2009-2010 sehingga peningkatan penerimaan pajak reklame tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan penurunan pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Probolinggo. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya penetapan suatu kebijakan mengenai penambahan objek pemungutan pajak daerah baruyang dapat mempengaruhi pajak daerah secara keseluruhan, adanya kebijakan walikota mengenai penghijauan yang melarang pemasangan reklame di jalur tertentu sehingga objek reklame berkurang, serta usaha dari wajib pajak untuk menghindari pajak baik secara aktif maupun pasif, serta faktor lainnya.

Kontribusi

Tabel 4 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009-2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	794.506.529,00	7,051,602,838.80	11,26%
2010	612.604.150,00	7,701,059,684.00	7,95%
2011	638.962.750,00	11,713,781,859.00	5,45%
2012	726.489.315,00	13,933,502,844.00	5,21%
2013	799.792.561,00	20,950,774,756.00	3,82%
2014	861.011.615,00	24,428,934,181.00	3,52%
Rata-rata			6,20%

Sumber: Data Diolah, 2015

Kontribusi dihitung untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan total pajak daerah.

Berdasarkan tabel 4 kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Probolinggo periode 2009-2014 menunjukkan kontribusi yang sangat kurang. Kontribusi paling tinggi pada tahun 2009 sebesar 11,26% dan yang terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,52%, serta rata-rata sebesar 6,20% yang masuk dalam kriteria “sangat kurang”. Pemerintah Kota Probolinggo perlu untuk mengetahui dan memahami potensi-potensi apa saja yang harus dioptimalkan dari pajak reklame, sehingga di tahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang berarti terhadap penerimaan pajak daerah.

Hambatan

Dalam hal pemungutan pajak reklame dan pajak daerah DPPKA mengalami hambatan-hambatan yaitu:

- a. Banyaknya objek pajak yang tidak memperpanjang pemasangan reklame dan reklame yang masa pemasangannya sudah habis akan tetapi tidak segera dibongkar, banyaknya pemasangan reklame liar
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dengan adanya manipulasi objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang dapat membuat pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada yang seharusnya.
- c. Kurangnya aparat pelaksana khususnya di bagian dinas luar yang bertugas sebagai untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

- d. Setiap tahun selalu muncul tunggakan yang menyebabkan penerimaan kurang optimal, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan pajak reklame.

Upaya

DPPKA Kota Probolinggo melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan mengurangi hambatan yang terjadi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya melalui intensifikasi dilakukan denganpeningkatan kinerja pemungutan pajak, kinerja pemungutan pajak yang dimaksud adalah penyempurnaan pendataan, penetapan dan penagihan yang diatur sehingga menjamin kelancaran, ketetapan alur penerimaan atas hasil pemungutan ke kas daerah. Meyesuaikan antara laporan yang diserahkan oleh Wajib Pajak dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DPPKA Kota Probolinggo bidang pendapatan untuk memaksimalkan pendapatan pajak berkaitan dengan pencarian data yang belum ada, penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, melakukan sosialisasi melalui media massa seperti koran dan videotron sebagai salah satu strateginya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah Kota Probolinggo tahun 2009-2014 adalah 2,57% dan 29,44% dengan sumbangan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 6,20% mendapat kriteria “sangat kurang”. Hambatan-hambatan yang terjadi telah dilakukan upaya oleh DPPKA Kota Probolinggo melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Saran

Bagi DPPKA Kota Probolinggo agar lebih gencar melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah.Mengembangkaninovasi-inovasi pelayanan baru seperti kerjasama dengan beberapa bank nasional lainnya yang mampu memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat*. Yogyakarta: YKPN.  
Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo. 2013. *Probolinggo Dalam Angka 2013*.

- <http://probolinggokota.bps.go.id>  
(diakses tanggal 4 Februari 2015).
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: YKPN.
- Kota Probolinggo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sripradita, Nio Anggun. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi dua Revisi. Jakarta: MitraWacana Media.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.